



## **TESIS**

### **ANALISIS PENGARUH INVESTASI MODAL FISIK DAN INVESTASI MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENT AND HUMAN CAPITAL INVESTMENT (EDUCATION AND HEALTH) ON POVERTY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**

**MISBAHUDDIN  
P0400215003**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



# TESIS

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI MODAL FISIK DAN INVESTASI MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**MISBAHUDDIN**  
**P0400215003**



kepada

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBERDAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2019**



# TESIS

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI MODAL FISIK DAN INVESTASI MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**MISBAHUDDIN**

Nomor Pokok P0400215003

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 10 Januari 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si

Ketua

Dr. Hamrullah, S.E., M.Si

Anggota

Ketua Program Studi  
Ekonomi Sumber Daya,

Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misbahuddin  
NIM : P0400215003  
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Sumber Daya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

### **ANALISIS PENGARUH INVESTASI MODAL FISIK DAN INVESTASI MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



  
Misbahuddin



## PRAKATA

Bismillah, segala puji bagi Allah Rabb Pencipta Alam Semesta, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini yang merupakan tugas akhir dan salah satu tahapan dalam penyelesaian Program Studi Pascasarjana Ekonomi Sumber Daya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai tauladan bagi kita semua para akademisi maupun para cendekiawan.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada;

Dr. Sanusi Fattah, S.E.,M.Si selaku penasihat pertama dan Dr. Hamrullah, S.E., M.Si selaku penasihat kedua. Ditengah kesibukannya, beliau berdua tetap meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis untuk sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini. Ketua Program Studi Ekonomi Sumber Daya, Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., yang telah memberikan semangat dan terus memberikan dorongan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir.

Rektor universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir. S.E., M.Si., CIPM., yang telah menyediakan fasilitas belajar selama berada di Sekolah Pascasarjana Ekonomi Sumber Daya Universitas Hasanuddin.





Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D selaku penguji pertama, Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si., selaku penguji kedua, Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., selaku penguji ketiga, yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penulisan karya tulis ilmiah ini agar dapat mencapai taraf yang layak untuk dibaca dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Ibunda Andi Asriany, S.K.M., M.Kes., dan almarhum Ayahanda Syamsuddin, S.E., selaku orang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan dorongan serta berkat nasehat kebaikan dan doa dalam sholat yang beliau terus panjatkan kepada Allah subhanawatalah telah memberikan kekuatan terhadap motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan sampai pada tahap ini.

Orang tua mertua Agus Syifauddin dan Sunarwati Asmarani, Dian Anggraeni Agus (Istri tercinta), Rizky Nidiastuti Agus, yang telah meluangkan waktunya dalam membantu dan menggantikan peran penulis dalam menjaga keluarga dan anak-anak penulis selama masa pendidikan. Saudara-saudara penulis, Sunandar Syamsuddin, Sitti Khadijah dan Sri Ningsih yang telah memberikan motivasi untuk melanjutkan jenjang Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Teman-teman alumni Program Ekonomi Sumber Daya, Program Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar angkatan tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah membantu dan mendukung penulis selama menjalani program pendidikan dan pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini juga masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, sangat besar harapan kami agar para pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik yang disematkan dengan



saran membangun kepada penulis melalui alamat email  
embachelsky@gmail.com. Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2019

Misbahuddin



## ABSTRAK

**MISBAHUDDIN.** *Analisis Pengaruh Investasi Modal Fisik dan Investasi Modal Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Sanusi Fattah dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan dan pengaruh investasi modal fisik dan investasi modal manusia (pendidikan dan kesehatan) terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (*pooled data*). Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 24 kabupaten/kota melalui aplikasi SPSS 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi investasi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan; investasi modal fisik terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan; dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan hubungan positif dan signifikan di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2011–2017.

Kata kunci: investasi modal fisik, investasi pendidikan, investasi kesehatan dan kemiskinan







## ABSTRACT

**MISBAHUDDIN.** *An Analysis on the Effect of Physical Capital Investment and Human Capital Investment (Education and Health) on Poverty Level in South Sulawesi Province* (supervised by **Sanusi Fattah** and **Hamrullah**)

The aim of this research is to determine the correlation and effect of physical capital investment and human capital investment (Education and Health) on poverty level through economic growth in South Sulawesi Province.

The types of data used in this research was secondary data in the form of panel data (pooled data). This research was conducted in South Sulawesi Province in 24 regencies/cities. The data were analysed using SPSS 20 application.

The result of analysis indicates health investment has a negative and significant correlation with economic growth. Physical capital investment has a negative and significant correlation with poverty level. Economic growth has a positive and significant effect on poverty in 24 regencies/cities in South Sulawesi during the period of 2011-2017.

Key words: physical capital investment, educational investment, health and poverty investment





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kemiskinan	13
2.1.1 Definisi Kemiskinan	13
2.1.2 Konsep dan Bentuk Kemiskinan	15
2.1.3 Ukuran dan Indikator Kemiskinan	16
2.1.4 Penyebab dan Penanggulangan Kemiskinan	21
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3 Investasi	35
2.3.1 Pengertian dan Teori Investasi	35
2.3.2 Jenis-Jenis Investasi	37
2.4 Investasi Modal Fisik	39
2.5 Investasi Modal Manusia	40
2.5.1 Investasi Pendidikan	41
2.5.2 Investasi Kesehatan	43
2.6 Hubungan Antar Variabel	45



2.6.1 Hubungan Investasi Modal Fisik Terhadap Kemiskinan	45
2.6.2 Hubungan Investasi Pendidikan Terhadap Kemiskinan	46
2.6.3 Hubungan Investasi Kesehatan Terhadap Kemiskinan	48
2.6.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	49
2.7 Studi Empiris dengan Penelitian Sebelumnya	50
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	<b>52</b>
3.1 Kerangka Konseptual	52
3.2 Hipotesis	58
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>60</b>
4.1 Jenis dan Sumber Data	60
4.2 Teknik Pengumpulan Data	60
4.3 Metode Analisis	60
4.4 Uji Asumsi Klasik	64
4.5 Definisi Operasional	66
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>68</b>
5.1 Deskripsi Objek Penelitian	68
5.1.1 Gambaran umum Provinsi Sulawesi Selatan	68
5.1.2 Gambaran umum Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan	70
5.2 Deskripsi Data Penelitian	72
5.2.1 Persentase Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 - 2017	72
5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2011 – 2017	74
5.2.3 Investasi Modal Fisik di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2017	76
5.2.4 Investasi Pendidikan dan Investasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2011 – 2017	77
5.3 Model Penelitian	78
5.4 Hasil Analisis Data	80
5.4.1 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung	81
5.4.2 Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung	83
5.4.3 Nilai Total Estimasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	86
5.5 Pembahasan	87
5.5.1 Pengaruh Investasi Modal Fisik (X <sub>1</sub> ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	87



5.5.2 Pengaruh Investasi Pendidikan ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	87
5.5.3 Pengaruh Investasi Kesehatan ( $X_3$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	88
5.5.4 Pengaruh Investasi Modal Fisik ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ )	90
5.5.5 Pengaruh Investasi Pendidikan ( $X_2$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ )	94
5.5.6 Pengaruh Investasi Kesehatan ( $X_3$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ )	94
5.5.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ )	94
5.5.8 Pengaruh Investasi Modal Fisik ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ) Melalui Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	96
5.5.9 Pengaruh Investasi Pendidikan ( $X_2$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ) Melalui Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	96
5.5.10 Pengaruh Investasi Kesehatan ( $X_3$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ) Melalui Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	108



## DAFTAR TABEL

1.1	Investasi Modal Fisik, PDRB dan Kemiskinan di Sulawesi Selatan 2012 - 2016	2
1.2	Investasi Modal Manusia (Pendidikan dan Kesehatan), di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016	7
5.1	Data Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	71
5.2	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung	81
5.3	Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung	83
5.4	Nilai Hasil Uji Sobel	85
5.4	Nilai Total Estimasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	85





## DAFTAR GAMBAR

1.1 Rata-rata persentase Kemiskinan (Headcount Index) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 2016	2
3.1 Kerangka Konsep Penelitian	54
5.1 Angka Persentase Kemiskinan Tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2017	73
5.2 Nilai Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2017	74
5.3 Grafik Investasi Modal Fisik di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2017	76
5.4 Akumulasi Investasi Pendidikan dan Investasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2017	77
5.5 Model Penelitian	79
5.6 Nilai Estimasi Hubungan langsung dan Tidak langsung antar variabel	80



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Variabel	109
2. Uji Asumsi Klasik	120
3. Hasil Regresi dengan SPSS 20	123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan negara-negara terbelakang. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga masih belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini secara utuh.

Pada tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2018 adalah sebanyak 25,95 juta orang dari total jumlah 250 juta penduduk Indonesia dan provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi ke 18 dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari total 34 provinsi se-Indonesia. Persentase kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan bergerak berfluktuatif dari periaode ke masa namun telah berhasil tertekan hingga ke angka satu digit. Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik bahkan melebihi angka pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional.

Todaro (2000) berpendapat bahwa cara pandang ekonomi terbaru menggaris bawahi tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada tingginya angka pertumbuhan PDB saja, namun juga bagaimana distribusi PDB dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran dan campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengontrol kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang mampu mendistribusi hasil pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata pada semua lapisan masyarakat.

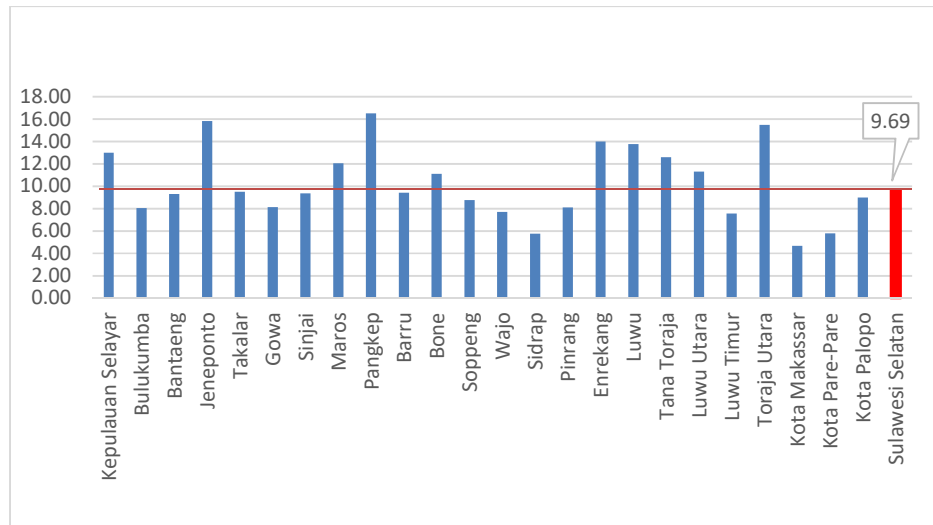


Mengatasi masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja sangat berkaitan dengan investasi modal fisik karena untuk menciptakan lapangan kerja baru, dibutuhkan iklim investasi yang kondusif dan juga akses yang mudah terhadap sumber daya finansial untuk permodalan untuk mendorong masyarakat lebih produktif dan menjaga ketersediaan lapangan usaha pada sektor non formal sehingga tidak tergantung pada sektor formal. Kualitas sumber daya manusia yang baik juga akan mendorong tingkat produktifitas, efektifitas dan efisiensi melalui pemanfaatan dan penciptaan teknologi sehingga produk yang dihasilkan lebih variative, nilai jual produk yang dihasilkan akan lebih tinggi dan dapat meningkatkan daya saing. Maka dari itu peran Investasi fisik dan Investasi sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam memacu produktifitas masyarakat yang akan mengurangi angka kemiskinan.

Rata-rata persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 9.69%. Angka ini terdistribusi secara tidak merata pada wilayah-wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) Kabupaten dan 3 (Tiga) Kota. Sebaran angka kemiskinan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ;



Gambar 1.1 Rata-rata persentase Kemiskinan (*Headcount Index*)  
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2011 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data Diolah

Dari gambar 1.1 diatas, terlihat kantong-kantong kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2011 - 2017 tersebar pada 10 (sepuluh) kabupaten. Urutan rata-rata persentase kemiskinan tertinggi adalah dimulai dari Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara aggregate angka persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu berada pada angka dua digit dan lebih rendah dari angka kemiskinan secara nasional, namun angka-angka tersebut masih belum merata ke semua wilayah. Dari 24 kabupaten/kota yang ada, hanya ada 14 wilayah administratif yang mampu menekan angka persentase kemiskinan dibawah 10%, sementara 10 wilayah administratif yang disebutkan diatas masih membutuhkan perhatian.





Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan kesempatan dan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan negara melalui pelayanan publik, peningkatan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri). Dengan kata lain bahwa arah dari pembangunan ekonomi adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan cara peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi.

Mishkin (2012), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan memacu peningkatan produktifitas perkapita melalui investasi sumberdaya manusia, investasi fisik dan kesempatan kerja. Investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dalam model pertumbuhan dasar, tingkat produktifitas dipengaruhi oleh fungsi modal dan angkatan kerja. Modal yang dimaksud dalam hal ini adalah modal fisik yang digunakan langsung sebagai alat maupun bahan produksi dan angkatan kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Semakin besar modal fisik dan semakin besar dan berkualitas jumlah sumber daya manusia maka kapasitas produktifitas juga akan meningkat dan menambah jumlah produksi

Dalam konteks pembangunan, produktifitas diukur dengan besaran angka produk domestik bruto (PDB/PDRB) dalam suatu wilayah. Aktivitas kegiatan investasi modal fisik (*Fixed Asset Investment*) dalam meningkatkan



kapasitas produktifitas pada suatu wilayah tercermin pada besaran angka pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB adalah merupakan salah satu bagian dalam penghitungan PDB/PDRB dari sisi konsumsi. Semakin besar angka PMTB akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru yang akan menyerap pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkan iklim ekonomi dan yang pasti secara tidak langsung akan berdampak pada persentase kemiskinan.

Tabel 1.1 Investasi Modal Fisik, PDRB dan Kemiskinan di Sulawesi Selatan  
2012 - 2016

Tahun	Investasi Modal Fisik	PDRB	Kemiskinan
	(Milliar Rupiah)	(Triliun Rupiah)	(%)
2012	73.108,97	202,18	9.82
2013	82.975,85	217,59	10.32
2014	89.710,70	233,99	9.54
2015	96.963,27	250,80	9.39
2016	103.769,17	269,42	9.24

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data Diolah

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan jumlah investasi modal fisik dalam rupiah terus bertambah dalam dari tahun 2012 ke tahun 2016. Hal ini sejalan dengan peningkatan produk domestik regional bruto yang juga meningkat dari tahun ke tahun dan persentase kemiskinan menurun. Hal ini memberikan opsi bahwa penambahan modal fisik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Data investasi modal fisik diatas merupakan keseluruhan jumlah belanja modal pemerintah kabupaten / kota yang bersumber dari dari laporan realisasi anggaran, belanja modal fisik perusahaan-perusahaan dan investor baik dari



dalam negeri maupun luar negeri yang di kumpulkan oleh BPS wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Sumberdaya manusia juga merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Investasi dalam sumber daya manusia akan membentuk modal manusia yang kuat. Dengan tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, akan lebih mudah bagi individu yang memasuki usia kerja untuk memahami, menerapkan kemajuan teknologi dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi standar masyarakat. Meier, et al, (2005), menyarankan agar setiap negara harus meningkatkan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan ini.

Solow (1956) juga menekankan pada peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumberdaya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pendidikan mempunyai tujuan yang lebih dari hanya mempersiapkan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan *employability*. Namun dengan alasan kemanusiaan, Solow menuntut pendidikan sebagai suatu proses total untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan akan mengembangkan seluruh pribadi manusia termasuk mempersiapkan manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan



inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Tabel 1.2 Investasi Modal Manusia (Pendidikan dan Kesehatan),  
di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016

Tahun	Sektor Pendidikan (Juta Rupiah)	Sektor Kesehatan (Juta Rupiah)
2012	10,920.60	3,635.06
2013	11,918.82	4,021.32
2014	12,473.45	4,432.71
2015	13,378.00	4,845.17
2016	14,295.97	5,254.63

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Data Diolah

Tabel 1.3 diatas memperlihatkan jumlah investasi modal manusia baik pada sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 ke tahun 2016 terus meningkat. Investasi Pendidikan mencakup kegiatan pendidikan di berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis serta berbagai alat komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan publik dan swasta yang juga mencakup pelatihan dan pengajaran, terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan dukungan pendidikan. Pendidikan ini dapat disediakan di dalam ruangan, melalui siaran radio dan televisi, internet, dan korespondensi. Tingkat pendidikan diklasifikasikan sebagai layanan pendukung pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lainnya.



Sementara itu, investasi kesehatan yang dimaksud adalah meliputi penyediaan layanan kesehatan dan kegiatan sosial dalam cakupan yang cukup luas, dimulai dari perawatan kesehatan yang diberikan oleh profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya hingga kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkat kegiatan perawatan kesehatan hingga kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga profesional kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan dan kegiatan sosial juga meliputi, layanan rumah sakit, layanan klinis, praktek dokter layanan rumah sakit lainnya, layanan perawatan kesehatan, paramedis layanan transportasi khusus, layanan perawatan kesehatan tradisional, layanan pendukung pengangkutan orang sakit (evakuasi medis), layanan kesehatan hewan dan pekerjaan sosial jasa yang semuanya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sektor kesehatan.

Mankiw (2008) mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas modal manusianya. Dalam jangka panjang, pembentukan modal manusia melalui peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Todaro, 2006)..

Schultz (1978) menemukan bahwa di Kanada, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 25%, sementara itu di Ghana sebesar 23% yang lebih besar dari Amerika Serikat sebesar 15% (Suryadi, 1997). Meskipun angka ini masih lebih kecil dari faktor produksi lainnya yang berasal dari faktor teknologi dan faktor modal tetap, namun investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan semakin memberikan perannya seiring dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.





Sejalan dengan itu, Nurkse (1953), dengan teori perangkap lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) dalam konteks negara, menjelaskan penyebab negara-negara berkembang itu miskin karena rendahnya produktivitas yang mengakibatkan pendapatan penduduknya rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimumnya saja dan tidak memiliki kemampuan untuk menabung. Menurutnya tabungan adalah sumber utama dalam pembentukan modal finansial yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Investasi rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah dan menjadi penyebab pendapatan rendah. Demikian halnya, penduduk miskin tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan maupun mengkonsumsi makanan bergizi sehingga akan membuatnya menjadi lemah dan mudah terjangkit penyakit. Akibat kelemahan ini, produktifitas mereka berkurang dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang kemudian akan menggiring mereka masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Nurkse menggarisbawahi rendahnya produktifitas masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan pendapatan mereka rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk menabung. Produktifitas yang rendah disebabkan oleh rendahnya kepemilikan modal fisik dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan serta asupan gizi yang kurang oleh karena jeratan kemiskinan.

Nurkse berpendapat tabungan akan membentuk modal finansial sehingga negara ataupun masyarakat dapat melakukan investasi dan menambah kapasitas produktifitas. Menurutnya pembentukan modal finansial merupakan salah satu indikator yang vital dalam mendorong produktifitas yang akan memacu pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.



Dengan ketersediaan modal finansial akan memudahkan dalam pembentukan stok modal tetap dan stok modal manusia yang akan memacu perkembangan teknologi, yang akan semakin memuluskan kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Lapangan kerja akan tercipta sehingga kesempatan kerja bertambah dan kemiskinan dapat tereduksi.

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Investasi mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kesempatan kerja (Gali et al, 2007).

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi yang menjelaskan hubungan antara investasi modal fisik dan investasi modal manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini, dan dengan melihat masalah latar belakang diatas, menjadi jelas bahwa proses pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah sangat perlu dilakukan. Akan tetapi sebuah pertumbuhan ekonomi tidak akan tercipta begitu saja, sehingga perlunya melakukan berbagai analisa yang melibatkan berbagai sektor ekonomi lainnya. maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dengan melakukan studi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh dari variabel Investasi modal fisik, variabel investasi pendidikan dan variabel investasi kesehatan terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan mengambil sebuah judul penelitian "Analisis Pengaruh Investasi Modal Fisik dan Investasi Modal Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan".



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Investasi modal fisik berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah investasi pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah investasi kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi modal fisik terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi modal manusia sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bukan hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan keberhasilan tersebut.
2. Sebagai bahan acuan kepada pihak-pihak yang memegang kendali dan berkontribusi aktif dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Sebagai bahan pertimbangan kepada akademisi sehingga tugas akhir ini menjadi relevan dengan ilmu yang didalami penulis dan menjadikan tugas ini sebagai bentuk latihan untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya.



## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Kemiskinan

##### 2.1.1 Definisi Kemiskinan

Beragamnya istilah dan pengertian miskin dan kemiskinan akan kita mulai bahas dari sudut Fiqih Islam. Firman Allah dalam surat al-Balad ayat 16: yang artinya "Atau kepada orang miskin yang sangat fakir." (QS. al-Balad: 16). Berdasarkan ayat tersebut, Madzhab Hanafi membedakan antara orang yang fakir dengan orang yang miskin dengan penjelasan bahwa orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.

M.Qiraish Shihab (1998), menjelaskan bahwa pengertian lain kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak-sejahteraan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya. Namun dalam al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti al-Qur'an menyebut setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin dan harus dibantu. Oleh karena itu pengertian miskin tergantung kepada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan, misalnya) selalu berubah-ubah.



Pendapat yang dikemukakan oleh Romer (1992), bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kemiskinan dimaknai sebagai komponen sosial dan moral dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kemiskinan juga difahami sebagai bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan yang diperoleh, serta pendidikan dan keahlian yang juga relatif rendah.

Friedman (2004) memaknai kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Dimana basis ini meliputi seperti modal produktif diantaranya tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi kegiatan tersebut ketika berjalan dengan baik maka perlahan manusia yang menjalankannya akan berangsur-angsur keluar dari lingkaran kemiskinan.

Syahyuti (2006) memberikan argumen yang serupa dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan yang dianjurkan. Artinya kemiskinan dapat difahami sebagai keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kemiskinan dari sudut pandang ekonomi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana daya beli atau kemampuan seseorang sangat rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (primer), seperti : sandang, pangan, dan papan. Seiring dengan semakin kompleksnya faktor-

faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya, kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi ekonomi saja, melainkan semakin meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan bahkan politik.

### **2.1.2 Konsep dan Bentuk Kemiskinan**

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian dan konsep pemikiran kemiskinan, maka cara pandang tentang kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : (1) Kemiskinan Absolut yang mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan wilayah. Seseorang masuk dalam bentuk kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. (2) Kemiskinan relatif yaitu kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Selanjutnya, kemiskinan relative dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 (tiga) yaitu (1) Kemiskinan struktural yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. (Tan, et al, 1980). Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang

atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. (2) Kemiskinan situasional, yaitu kemiskinan yang tidak terduga karena situasi tidak menguntungkan, atau karena tinggal di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin. misalnya; kehilangan tempat tinggal karena bencana alam, kehilangan pekerjaan, meninggalnya anggota keluarga. Biasanya berlangsung dalam jangka pendek dan dapat teratasi setelah adanya bantuan dari pihak lain baik dari kerabat keluarga maupun pemerintah. (3) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin (Mardimin, 1996). Kemiskinan jenis ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena suatu situasi atau lingkungan yang membuat generasi tersebut tetap dalam kemiskinan. Anak yang hidup dalam kemiskinan ini akan terbiasa dengan gaya hidup miskin. Kemiskinan jenis ini juga tidak dapat diperbaiki begitu saja dengan mudah. Seseorang harus memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk berubah dan berusaha untuk memutus rantai kemiskinan yang sudah terbentuk lama.

### **2.1.3 Ukuran dan Indikator Kemiskinan**

Pengukuran kemiskinan yang akurat dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya



digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS menyediakan 2 jenis data yaitu data kemiskinan makro dan mikro. Penghitungan penduduk miskin dengan pendekatan makro didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan) dan sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Data ini berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin (sasaran) sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung dan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, dan Jamkesmas. Untuk penyaluran bantuan langsung yang memerlukan nama dan alamat target dibutuhkan data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus, bukan sampel. Berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa dilakukan secara cepat dan hemat biaya.

Untuk menentukan batas kelompok masyarakat miskin, BPS menggunakan metode garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Untuk mengkalisifikasikan tingkat intensitas kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu

1. Head Count Index,

yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2. Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan)

Memberikan gambaran informasi mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan tersebut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran Head Count Index. Sementara itu Bank Dunia (*World Bank*) mengukur kemiskinan absolut sebagai standar hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari, dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari. Bank Dunia membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*purchasing power parity*/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global /internasional.

Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika Serikat. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun. Garis kemiskinan PPP disesuaikan antar waktu dengan angka inflasi relatif, yaitu menggunakan angka indeks harga konsumen. Chen dan Ravallion (2001) membuat suatu penyesuaian angka kemiskinan dunia dengan menggunakan garis kemiskinan US\$ 1 perhari. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, pada tahun 1993 garis kemiskinan US\$ 1 PPP per hari adalah ekuivalen dengan Rp. 20.811,- per bulan.

Untuk mengukur kemiskinan relative, standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika Serikat, yaitu garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

#### 2.1.4 Penyebab dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Permasalahan masih besarnya jumlah penduduk miskin di negara-negara berkembang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayah mereka baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan produktifitas masyarakat menjadi sangat terbatas menyebabkan pendapatan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya apalagi untuk menabung. Ragnar Nurkse (1953), melalui teori perangkap lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), menjelaskan penyebab Negara-negara berkembang itu miskin karena rendahnya produktivitas yang mengakibatkan pendapatan penduduknya juga ikut rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimumnya saja dan tidak memiliki kemampuan untuk menabung. Menurutnya tabungan adalah sumber utama dalam pembentukan modal finansial yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Investasi rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah dan menjadi penyebab pendapatan rendah. Demikian halnya, Penduduk miskin tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan maupun mengkonsumsi makanan bergizi sehingga akan membuatnya menjadi lemah dan mudah terjangkit penyakit. Akibat kelemahan ini, produktifitas mereka berkurang dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang kemudian akan menggiring mereka masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Sementara itu, di Indonesia kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain : Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Kesempatan berusaha di



daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

Ketiga, harga bahan pokok cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Hal ini lebih disebabkan oleh hasil pertanian yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga Impor bahan-bahan pokok masih dilakukan sehingga harga bisa terpengaruh oleh tingkat stabilitas mata uang dollar.

Menanggapi permasalahan kemiskinan yang semakin memojokkan setiap negara, PBB melalui program MDGs-nya melakukan sebuah inisiatif

bahwa pemberantasan kemiskinan harus dilakukan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan manusia dan mengentaskan kemiskinan.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia berkewajiban untuk turut melaksanakan amanat dari program MDGs. Berbagai langkah yang ditempuh untuk mengatasi problematika kemiskinan, antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut tersebut diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS), program selanjutnya seperti, perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial.

Selain pemberdayaan, program-program untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan juga akan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil misalnya, bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih diperluas cakupannya.

Program-program lainnya yang akan dilanjutkan seperti, transformasi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan, serta keberlanjutan subsidi energi dan pupuk, bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS, bantuan pendidikan melalui KIP, bantuan sosial di luar sistem keluarga, dan jaminan sosial yang lain diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Guna memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, Pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui:

1. Redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat,
2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta
3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

## 2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan dalam jangka waktu panjang akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi oleh para ahli dan pakar ekonomi adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Adam Smith

Teori ini memaparkan tentang bagaimana mengelola perekonomian dengan cara melakukan persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Beliau beranggapan bahwa dengan cara ini pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan lebih maksimal. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan *output* total.



Pandangan-pandangan lainnya yang disampaikan dalam teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith di antaranya adalah, pertama, bahwa setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memaksimalkan kesejahteraan. Dalam perekonomian ini ada kekuatan yang tidak nampak (Invisible Hand) yang menyebabkan perekonomian akan memperlakukan individu sesuai dengan harapannya. Kedua, bahwa proses akumulasi/pembentukan modal meningkat seiring terjadinya peningkatan tabungan. Tabungan akan semakin meningkat ketika pendapatan tinggi dengan kondisi konsumsi relatif tetap. Ketika tabungan tinggi maka penyediaan modal untuk investasi semakin tinggi. Ketiga, tingkat suku bunga akan semakin menurun ketika kemakmuran, kesejahteraan, dan jumlah penduduk semakin meningkat. Tingkat suku bunga rendah menyebabkan biaya investasi dan produksi menjadi lebih murah. Pertambahan penduduk menyebabkan cadangan modal juga bertambah. Keempat, Proses pertumbuhan bersifat akumulatif. Peningkatan satu sektor ekonomi dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Peningkatan di bidang pertanian dapat meningkatkan bidang usaha industry, dan niaga dan seterusnya, sampai terjadi kelangkaan sumber daya sehingga perekonomian mangalami kondisi stasioner. Kelima, Pembagian kerja akan meningkatkan daya produktifitas tenaga kerja akibat adanya peningkatan keterampilan dan penemuan mesin yang hemat tenaga kerja, secara keseluruhan akan menghemat waktu produksi.

Teori ekonomi ini biasa juga disebut dengan teori ekonomi klasik kapitalis. Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Kaum klasik percaya bahwa

perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya.

## 2. Teori pertumbuhan Ekonomi Keynes

John Maynard Keynes, Seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri.

Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin



berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod (1939) dan Evsey Domar (1947). Kedua ahli ekonomi ini mengemukakan teorinya secara terpisah, namun keduanya memiliki inti maksud yang sama sehingga kedua teori ini dikenal dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini menganalisis persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*Steady Growth*) dengan memberikan peran penting pada pembentukan Investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap faktor penting karena berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Investasi dianggap mampu mempengaruhi sisi permintaan dan sisi penawaran.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti

barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal ( $K$ ) dan output total ( $Y$ ), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio output modal tersebut.

#### 4. Teori Model Pertumbuhan Ekonomi Solow

Model pertumbuhan ekonomi ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian yang akan memberikan pengaruh terhadap *output* barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (*Aggregate*). Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Solow-Swan, tergantung pada pertumbuhan persediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan.

R.M. Solow membangun model pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif terhadap konsep model pertumbuhan yang dibuat oleh Harrod-Domar dengan menghilangkan asumsi yang dianggap meragukan. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan sepanjang waktu.

Dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, maka rasio modal buruh akan cenderung saling menyesuaikan selama perjalanan waktu ke arah rasio

keseimbangan. Jika sebelumnya rasio modal terhadap buruh lebih besar, maka modal dan output akan tumbuh lebih lambat daripada tenaga buruh, demikian pula sebaliknya. Analisis Solow ini berakhir pada keseimbangan dengan keadaan mantap yang berangkat dari sebaran rasio modal-buruh.

Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi *output*-nya. Dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan dengan mantap. Hal ini disebut pertumbuhan seimbang, (*Balance Growth*).

##### 5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut W.W. Rostow

Menurut teori ini, Pembangunan jika sudut pandang nya dalam arti proses, diartikan sebagai modernisasi yakni pergerakan dari masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Untuk menekankan sifat alami 'pembangunan' sebagai sebuah proses, Rostow menggunakan analogi dari sebuah pesawat terbang yang bergerak sepanjang lintasan terbang hingga pesawat itu dapat lepas landas dan kemudian melayang di angkasa. Pembangunan, dalam arti tujuan, dianggap sebagai kondisi suatu negara yang ditandai dengan adanya kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, sebagian besar non-pertanian dan sangat berbasis perkotaan sebagai bagian teori modernisasi. Teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para



pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai 'teori modernisasi'.

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yakni : Pertama, masyarakat tradisional (*the traditional society*), Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton) dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun.

Tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hirarkhis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya adalah bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan nenek moyangnya. Sementara itu kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan paratuan tanah di daerah tersebut.

Kedua, prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*selfsustained growth*). Rostow sangat

menekankan perlunya perubahan-perubahan yang multidimensional, karena ia tak yakin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun menurut Rostow pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan dan penggunaan tabungan itu sebaik-baiknya. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan Rostow misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan moderen dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi.

Disamping itu harus ada orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisir cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada wiraswasta (entrepreneurs) yang inovatif untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas. Singkatnya, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan semata-mata tergantung kepada kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik produksi, pengambilan resiko, dan sebagainya.

Selain hal-hal di atas, Rostow menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur

ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan. Kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas.

Sementara itu pembangunan prasarana, menurut Rostow, bisa menghabiskan sebagian besar dari dana investasi. Investasi di bidang prasarana ini mempunyai 3 ciri yaitu tenggang waktu antara pembangunannya dan pemetikan hasilnya (*Gestation period*) sangat lama, pembangunannya harus dilakukan secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya yang banyak, dan manfaat pembangunannya dirasakan oleh masyarakat banyak. Berdasarkan sifatnya ini, maka pembangunan prasarana harus dilakukan pemerintah.

Selain hal-hal yang diungkapkan di atas, Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu kepemimpinan baru haruslah mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (*reactive nationalism*) yaitu bereaksi secara positif atas tekanan-tekanan dari negara maju.

Ketiga, tahap tinggal landas (*the take-off*), pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin

tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Rostow mengemukakan 3 ciri utama dari negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas yaitu: Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (Net National Product= NNP), Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sectors), Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Disini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri, karena kenaikan tabungan dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas.

Keempat, menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), Tahap menuju kedewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah. Ia juga menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara tersebut jenis-jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalah berbeda dengan yang ada pada tahap tinggal landas. Selanjutnya Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis

dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju ke kedewasaan adalah; Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun, Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik, Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi.

Dan kelima, masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*), Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap konsumsi tinggi ini ada 3 macam tujuan dari masyarakat yaitu; Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain, Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif, Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi

bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja. Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan dan sebagainya).

## **2.3 Investasi**

### **2.3.1 Pengertian dan Teori Investasi**

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Setyowati, 2007). Sedangkan menurut Samuelson (2004), investasi meliputi

penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Dari pengertian investasi diatas, maka investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari  $PDB = C + I + G + (X-M)$ .

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal. Berikut dipaparkan beberapa teori Investasi dari para ahli sebagai berikut :

1. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat

perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

2. Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007).

### **2.3.2 Jenis-Jenis Investasi**

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: investasi pemerintah dan investasi swasta. Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi



yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi akan bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: (1) Penanaman Modal Asing (PMA), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan (2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas (1) Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. (2) Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 (dua) jenis investasi yaitu: (1) investasi bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. (2) Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan). Sedangkan Investasi berdasarkan timbulnya adalah investasi otonomi yaitu pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional dan investasi terpengaruh (*induced investment*) yaitu investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

## 2.4 Investasi Modal Fisik

Investasi fisik adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Investasi fisik ini mencakup bangunan tempat tinggal dan non-perumahan, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan kecuali peralatan militer. Barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk dalam rincian ini tetapi diklasifikasikan sebagai konsumsi pemerintah.

Investasi fisik (*physical investment*) yakni semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal (Mankiw, 2000). Sementara itu, Sadono (2003), menyatakan pengertian

investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional meliputi:

(1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

Investasi fisik akan menciptakan asset baru yang akan meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu negara. Pembelian dan penambahan barang-barang modal seperti infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan melalui pembiayaan publik (Pemerintah) dan belanja pabrik baru, mesin, peralatan dan persediaan oleh pihak swasta akan menambah jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara.

## 2.5 Investasi Modal Manusia

Investasi non fisik atau lebih dikenal dengan investasi modal manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Penghasilan selama proses investasi ini sebagai imbalannya dan diharapkan memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Investasi yang demikian disebut dengan human capital (Simanjuntak, 1985).

Setelah Theodore W. Schult dan ekonom lain mulai membahas dampak investasi sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi barulah hal ini diperhatikan. Pembahasan mengenai hubungan investasi sumber daya manusia dengan produktivitas mulai santer menjadi topik diskusi setelah munculnya Gary S. Becker dengan analisisnya mengenai *Human Capital* (Warsito, 2002).



Modal manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami diminishing return, namun ilmu pengetahuan tidak. Robert M. Solow menekankan kepada peranan ilmu pengetahuan dan investasi modal sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Solow ini kemudian dikembangkan teori baru pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai The New Growth Theory (Tilaar, 2000).

### **2.5.1 Investasi Pendidikan**

Asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, tetapi, di pihak lain, menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung. Maka jumlah penghasilan yang diterimanya seumur hidupnya, dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value. Present Value ini dibedakan dalam dua hal, yaitu apabila pendidikannya hanya sampai SMA atau melanjutkan kuliah

di perguruan tinggi sebelum bekerja (Bruce E. Kaufman dan Julie L. Hotchkiss, 1999).

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan manfaatnya (*rate of return*) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan penghasilan yang bisa diterimanya dari bekerja bila ia tidak bersekolah (*opportunity cost*). Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan yang akan diterima dimasa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari pada biayanya.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi (Elwin Tobing, 2005).

Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan

walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya.

### **2.5.2 Investasi Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu komponen mutu modal manusia dalam pembangunan. Dalam kegiatan perekonomian, tinggi rendahnya mutu dan kualitas modal manusia ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Pendidikan yang tinggi dan penguasaan teknologi yang canggih belum tentu mampu memaksimalkan produktifitas jika status kesehatan yang ideal untuk beraktivitas dan bekerja belum tercapai.

Kesehatan dan pendidikan merupakan investasi terpadu yang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seorang individu. Keduanya memiliki satu kesamaan ciri yang mendasar yaitu bahwa keduanya merupakan bentuk pembiayaan yang mengandung elemen investasi dan elemen konsumsi.

Hampir disemua negara, pembiayaan sektor kesehatan dibiayai melalui sektor publik atau pemerintah dan sebagian lainnya melalui sektor swasta. Di negara berkembang umumnya negara lebih dominan sementara itu di negara maju umumnya sektor swasta lebih dominan. Investasi kesehatan

memberikan dampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kualitas produk yang dihasilkan karena kesehatan dapat mempengaruhi keadaan fisik para pekerja dan produksi yang dihasilkan. Satuan perubahan kualitas pembentukan modal manusia dari kesehatan dalam kaitannya dengan program pembangunan kesehatan masyarakat umumnya menggunakan sejumlah indeks yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) Indeks yang mengukur relativitas ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Contoh : jumlah dokter atau jumlah tempat tidur di Rumah sakit per 1.000 penduduk. (2) Indeks yang mengukur tingkat penggunaan fasilitas kesehatan. Contoh : Jumlah balita yang memperoleh imunisasi di pusat pelayanan kesehatan atau jumlah bayi yang lahir di Rumah sakit bersalin.

Dari sudut pandang ekonomi, satuan perubahan kualitas investasi kesehatan sering dilihat dari dampaknya terhadap status kesehatan secara umum, meliputi gizi yang lebih baik, perumahan yang lebih layak, kondisi kerja yang layak dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, Investasi kesehatan sering dikaitkan dengan kemiskinan. Kemiskinan dipercaya menjadi sumber kesakitan yang terjadi karena penyebaran penyakit terjadi di lingkungan yang miskin. Ada beberapa akibat dari timbulnya kesakitan terhadap produktifitas tenaga kerja yaitu ; (1) kematian (kehilangan kerja), (2) ketidakmampuan (kehilangan kam kerja), (3) kecacatan (kehilangan kapasitas kerja).

Pada bidang kesehatan, belum ada angka indeks yang mampu menghubungkan perubahan status kesehatan dengan perubahan tingkat pendapatan. Namun diyakini, bahwa resiko sakit dan kematian yang tinggi

memiliki potensi penghilangan pendapatan yang bersifat permanen. (Mushkin, 1962). Ada dua sumber daya ekonomi yang dihasilkan dari program kesehatan yaitu ; (1) penambahan tenaga kerja dan pendapatan nasional, (2) pembentukan modal (capital formation). Dengan melihat pengeluaran untuk program kesehatan sebagai salah satu bentuk investasi, dapat membantu pihak yang terkait untuk melihat kontribusi dari program kesehatan terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

## **2.6 Hubungan antar Variabel**

### **2.6.1 Hubungan Investasi Modal Fisik Terhadap Kemiskinan**

Berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menanggulangi jumlah angka kemiskinan namun sampai saat ini tidak satupun konsep mampu menjawab perubahan dalam mengurangi tingginya kemiskinan. Salah satu konsep yang dominan yang digunakan dalam ekonomi pembangunan adalah adanya modal fisik yang menjadi sebuah sarana umum yang selalu dicanangkan oleh pemerintah.

Hasilnyapun positif, bahwa belanja modal fisik setidaknya mampu memangkas kemiskinan melalui proses produktivitas yang berujung pada tingginya nilai jual produksi. Namun perlu diketahui bahwa produksi akan terbilang berhasil ketika adanya penambahan modal manusia dan modal fisik yang disatukan dalam proses produksi yang dikenal dengan istilah teknologi. Howitt (2005) misalnya menjelaskan dengan mengaitkan antara teori saat ini (Teknologi) dengan teori yang pernah dikemukakan oleh kaum neoklasik bahwa teknologi dan kemajuan merupakan sebuah masalah yang endogen.



Sebab teori endogen memperlakukan kemajuan teknologi sebagai kekuatan pendorong dibelakang kemajuan pertumbuhan jangka panjang.

Penekanan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Chaudhry (2009) bahwa pertumbuhan industri dengan titik awal melalui teknologi yang lebih modern akan bergantung pada modal manusianya. Sedangkan peningkatan tenaga kerja melalui proses pendapatan yang lebih tinggi tentunya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Dalam hal ini bahwa kesejahteraan merupakan ukuran dari miskin tidaknya seseorang.

Tingkat kemiskinan suatu negara sebenarnya bergantung pada bagaimana dinamika perekonomian berputar, baik akibat perubahan struktur perekonomiannya maupun perbedaan tingkat sektoral ekonominya. Walaupun diakui bahwa dalam pertumbuhan ekonomi modern, sektor industri menjadi lebih ideal dibandingkan dengan sektro lain namun adakalanya sektor industri menjadi tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi sebuah wilayah. Indonesia misalnya akan lebih tepat ketika pertumbuhan ekonominya mengarah pada perbaikan sektor pertanian dan kelautan secara menyeluruh sebab Indonesia kaya akan sumber daya diantara kedua sektor tersebut (Saragih, 2003).

### **2.6.2 Hubungan Investasi Pendidikan Terhadap Kemiskinan**

*Human capital* sangat berperan dalam ekonomi terutama di bidang pendidikan, karena permintaan tenaga kerja sangat membutuhkan keahlian tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan tingkat pendidikan menimbulkan kebijakan bagi suatu negara untuk

menetapkan peningkatan terhadap pendidikan yang bersifat investasi (Greenberg, 1999).

Dibenarkan oleh Amirullah, (2007) bahwa pendidikan selalu menyatu dalam pendekatan modal manusia. Istilah ini sering digunakan dalam pendekatan apakah manusia dilihat dari tingkatan pendidikan, atau dari standar kesehatan bahkan sampai kepada kapasitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas (Todaro dan Smith, 2003).

Romer (1990) berkeyakinan bahwa dengan adanya teknologi maka pertumbuhan akan terjadi secara berkesinambungan. Ditambahkan pula bahwa lahirnya tenaga-tenaga ahli di bidang pengembangan teknologi merupakan buah hasil dari pendidikan yang diterima di masa menjalani pendidikan.

Teori endogenius sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Schumpeter (Arsyad, 1999) bahwa untuk merangsang terjadinya peningkatan pertumbuhan dalam suatu wilayah maka perlunya inovasi yang dikembangkan. Seperti halnya kajian yang dilakukan oleh Mincer (1974), hasil yang ditemukan adalah adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat penerimaan gaji yang akan diterima seseorang di masa yang akan datang. Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan taraf hidup miskin seseorang (Amirullah, 2007).

Melalui pendidikan dapat diperoleh dua manfaat secara berurutan yaitu dengan pengetahuan yang lebih tinggi masyarakat akan mampu berpengetahuan secara lebih luas dan umum. Sedangkan manfaat yang kedua dengan pendidikan pandangan-pandangan dan budaya modern akan menunjukkan perannya dalam menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

### 2.6.3 Hubungan Investasi Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Dampak yang ditimbulkan oleh dunia kesehatan terhadap penekanan kemiskinan sangat dirasakan oleh semua negara di dunia. Sama halnya dengan Indonesia dan daerahnya yang menjadikan kesehatan sebagai salah satu titik sentral yang perlu diperbaiki dengan baik. Kesehatan selamanya akan menjadi penting bagi siapa dan apapun bentuknya artinya kesehatan merupakan tolak ukur yang utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang, negara, ataupun suatu wilayah.

Berdasar pada asumsi *human capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan sebenarnya merupakan bagian aspek yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan manusia itu sendiri. Aspek kesehatan menjadi lebih urgen sebab penciptaan sebuah lingkungan yang lebih kondusif secara tidak langsung akan lebih mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas kerja manusia dalam satu lahan kerja (Wilkins, 2011).

Mankiw (2008) menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melalui perbaikan modal manusia salah satunya adalah melalui perbaikan modal manusia melalui kesehatan. Dijelaskan pula bahwa acuan dasar mengenai langkah yang akan dilakukan oleh manusia sebenarnya selalu bertolak pada sehatnya mereka sebagai penggerak utama dalam menentukan problem kehidupan.

Dalam ekonomi dikenal adanya sumber daya yang harus dimiliki seseorang yaitu baiknya sebuah mutu pendidikan dan sehatnya seseorang dalam meningkatkan tujuan pembangunan untuk wilayah dan kehidupannya. Todaro (2006) memberikan sebuah argumen yang menguatkan bahwa

kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan merupakan pokok untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Sehingga kesehatan dan pendidikan akan menjadi pondasi utama dalam pembangunan yang mampu menekan kemiskinan menjadi lebih sedikit dari lonjakan yang dialami oleh sebuah wilayah.

#### **2.5.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Ahluwalia, Carter dan Chenery (1979) menegaskan bahwa terdapat beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Diantara yang dimaksud adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perbaiki distribusi pendapatan, dan penekanan jumlah penduduk. Terkhusus pertumbuhan ekonomi terdapatnya *Trade-Off* antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Proses ini telah dimaknai dengan baik oleh Bigsten dan Levin (2000) yang menemukan kejelasan tersendiri dari interaksi yang ditimbulkan oleh proses pertumbuhan ekonomi terhadap masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh ekspor, dimana dasar utamanya adalah penekanan pada manufaktur, pembangunan pertanian dan daerah pedesaan, dengan alasan pengenalan industri terbaru dari hasil capaian pembangunan *human capital*. Seakan gagal memecah kebuntuan dalam menjadikan kemiskinan hilang karena pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi cara ini tidak membuat masalah kemiskinan menjadi kaku ataupun terhapus namun kemiskinan tetap menjadi dominasi dalam melihat gejala yang terjadi dalam tatanan masyarakat.

Kunci dasar dalam memulihkan dan menekan terjadinya kemiskinan global adalah pentingnya penekanan pada interaksi antar sektoral dalam

menyusun strategi untuk mengurangi kemiskinan (Levin, 2000). Sementara ini, Hoeven (2004) mengatakan keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi di suatu negara dan ketidakmerataan pendapatan menjadi pemicu terjadinya dan munculnya kemiskinan. Sehingga penekanan yang dilakukan adalah perlunya penyusunan langkah pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks untuk sebuah wilayah.

Orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi satu wilayah tidak akan sama dengan pertumbuhan ekonomi wilayah lain sehingga perlu dilakukan analisis tertentu guna menentukan sampai dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi nantinya. Jelasnya Osmani (2004) menyebutkan bahwa dalam mengurangi kemiskinan maka setidaknya harus mengedepankan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat menjadi lebih tentram dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penggerak perekonomian.

## 2.6 Studi Empiris dengan Penelitian Sebelumnya

Nugroho (2015), menemukan bahwa PDRB dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, data yang diambil adalah data time series dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 di kota Yogyakarta.

Amalia (2012) menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di KTI. Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2001-2010.

Widodo (2011) menunjukkan adanya keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel pure moderator maupun sebagai variabel intervening (*mediating*) terhadap hubungan antara

pengeluaran publik dan kemiskinan, meskipun pengaruhnya masih sangat kecil. Hal yang perlu diperhatikan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut diikuti dengan indikator kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan yang menurun di Provinsi Jawa Tengah.

Seran (2012), menemukan bahwa baik sektor sosial yang terdiri dari pendidikan, inflasi, pendapatan, konsumsi, PDRB dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variasi kemiskinan di Indonesia. Hal yang paling disoroti adalah pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas yang lebih baik yang terkonsentrasi melalui pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan mampu terpangkas dari hasil pendapatan yang lebih tinggi.

Aimon (2012), menemukan bahwa hubungan produktifitas, investasi sumberdaya manusia, investasi fisik, kesempatan kerja terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia akan mampu direduksi secara signifikan oleh investasi sumberdaya manusia secara konsisten dan berdaya guna sehingga akan diikuti oleh peningkatan produktifitas agar tingkat kemiskinan dapat direduksi.

Situmorang (2007) menunjukkan bahwa variabel akumulasi modal fisik/tetap, variabel investasi pemerintah dalam bidang *human capital* yaitu pendidikan dan kesehatan serta jumlah tenaga kerja produktif berpendidikan tinggi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB Indonesia.